



---

## **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA BOS PADA SDN WARU 03**

**Fadia Inaya<sup>1\*</sup>, Adam Zakaria<sup>2</sup>, Rida Prihatni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

### ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the management of BOS Funds at SDN Waru 03, which includes the planning, implementation, and evaluation stages. The analysis is conducted based on five components in the Government Internal Control System (SPIP), namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data validity is obtained through technical triangulation. The results of the study indicate that the management of BOS funds has been running quite well and in accordance with SPIP principles. However, several obstacles are still found such as an imbalance in human resource competencies, limited facilities, weak external coordination, and the absence of written SOPs. Therefore, it is necessary to increase human resource capacity, optimize facilities, prepare SOPs, and strengthen cooperation with external parties through forums or regular consultations.*

**Keywords:** *BOS Funds, Elementary Schools, Internal Control, School Financial Management.*

### **How to Cite:**

Inaya, F., Zakaria, A., & Prihatni, R., (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOS pada SDN Waru 03, Vol. 6, No. 2, hal 284-294.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di satuan pendidikan memiliki peran untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran. Salah satu sumber utama pembiayaan operasional sekolah yang disediakan oleh pemerintah adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah mulai disalurkan sejak tahun 2005. Program ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta meringankan beban biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran dana dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik di masing-masing sekolah dan diberikan dalam dua tahap setiap tahunnya. Dana yang diterima digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penting di sekolah, seperti pengadaan alat tulis, pemeliharaan fasilitas, pelatihan guru, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Agar dana BOS digunakan secara tepat sasaran, sekolah wajib mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Juknis ini berisi panduan mengenai penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana agar pengelolaannya berjalan tertib dan sesuai aturan. Karena jumlah dana yang diterima cukup besar dan penggunaannya mencakup banyak kegiatan, maka penting bagi sekolah untuk mengelolanya secara transparan dan akuntabel.

Besarnya dana yang dikelola oleh sekolah serta beragamnya kebutuhan penggunaannya menuntut adanya sistem pengawasan yang memadai agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Dalam konteks lembaga pemerintah, SPI dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut disusun untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara efisien, memastikan keandalan laporan keuangan, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana BOS, keberadaan SPIP memiliki peran yang sangat penting. SPIP berfungsi sebagai sistem pengaman yang memastikan dana yang diterima oleh sekolah digunakan sesuai dengan rencana dan mendukung kegiatan prioritas pendidikan. Penerapan SPIP yang baik dapat membantu sekolah mengurangi potensi penyimpangan anggaran, meningkatkan transparansi, dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik serta penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip SPIP menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SPI di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Studi (Qurrota A'yun Zain, 2024) mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPI di SDN Kaliboto Lor 12 telah berjalan, namun masih lemah pada aspek pengawasan komite. Penelitian (Erwin Lumban Gaol, 2023) juga mencatat bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam penerapan pengendalian yang efektif. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun secara administratif berjalan, masih terdapat celah dalam praktik pengawasan dan infrastruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan di SDN Waru 03, sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang merupakan penerima dana BOS reguler. Peneliti memilih sekolah ini karena keterlibatan langsung melalui program asistensi mengajar, serta adanya kendala faktual seperti keterbatasan fasilitas dan belum optimalnya peran eksternal dalam proses evaluasi dana.

Melihat permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk memberikan kontribusi lebih dalam dengan melakukan penelitian berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOS Pada SDN Waru 03.”**

## TINJAUAN TEORI

### Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pasal 1 ayat 1 PP No 60 tahun 2008 menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Sedangkan menurut (Ulfa et al., 2024) Sistem Pengendalian Internal merupakan prosedur yang diterapkan agar dapat mengelola risiko untuk memastikan sumber daya dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas organisasi.

### Komponen Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat lima komponen utama yang menjadi fondasi dalam penerapan pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah, termasuk satuan pendidikan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan berfungsi secara terpadu dalam membentuk sistem pengendalian internal yang efektif. Adapun penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian : Komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan organisasi dalam menciptakan budaya pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, serta struktur organisasi yang mendukung fungsi pengawasan dan pelaksanaan tanggung jawab secara akuntabel.
2. Penilaian Risiko : Proses identifikasi dan analisis terhadap berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks satuan pendidikan, risiko dapat berupa ketidaksesuaian alokasi anggaran, penyalahgunaan dana, maupun lemahnya pengawasan internal.
3. Kegiatan Pengendalian : Terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan ini mencakup mekanisme otorisasi, verifikasi, pemisahan tugas, pengawasan transaksi keuangan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dana.
4. Informasi dan Komunikasi : Menjamin bahwa informasi yang relevan dan andal dapat dikumpulkan, diproses, dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu. Komunikasi yang terbuka dan dua arah antara pimpinan, staf, dan pihak eksternal sangat penting untuk mendukung pengendalian yang efektif.
5. Pemantauan (Monitoring) : Proses ini mencakup kegiatan evaluasi dan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan melalui audit internal, pengawasan manajerial, serta penilaian dari pihak eksternal untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan sesuai tujuan dan dapat ditindaklanjuti apabila ditemukan kelemahan.

Implementasi kelima komponen SPIP secara konsisten di lingkungan satuan pendidikan akan memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas publik, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam penggunaan dana. Oleh karena itu, setiap sekolah diharapkan mampu mengintegrasikan komponen-komponen ini dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran pendidikan.

### Penerapan SPIP dalam Lembaga Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lembaga pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Implementasi SPIP di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, antara lain:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada petunjuk teknis (juknis)

- resmi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola dana sekolah terhadap prinsip-prinsip pengendalian internal; dan
  3. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi secara rutin untuk menilai efektivitas pengendalian internal serta mengidentifikasi potensi perbaikan.

Penerapan tahapan tersebut secara konsisten berkontribusi pada upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus menjamin bahwa setiap bentuk pengeluaran keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Isnaini Hamidi et al., 2023).

### **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal (Jaya, 2021). Ada beberapa komponen yang didanai oleh dana BOS, diantaranya: Kegiatan Penerimaan Peserta Didik, Pengembangan Perpustakaan, Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran, Administrasi Kegiatan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembayaran Utilitas dan jasa, Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Peralatan Multimedia, Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan, Kegiatan Mendukung Keterserapan Lulusan, dan Pembayaran Honorarium guru non ASN.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan RI (Perbendaharaan, 2024) Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam melakukan pengelolaan dana BOS diantaranya:

#### **1. Fleksibilitas**

Penggunaan anggaran dilakukan secara adaptif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik tiap satuan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan di tingkat sekolah.

#### **2. Efektivitas**

Setiap pengajuan pembiayaan harus menghasilkan *output* yang jelas dan berdampak nyata, baik dalam hal peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, penyempurnaan kurikulum, maupun peningkatan kompetensi pendidik.

#### **3. Efisiensi**

Alokasi anggaran diatur secara sistematis agar penggunaan dana seminimal mungkin dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Prinsip efisiensi menekankan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran tanpa terjadi pemborosan.

#### **4. Akuntabilitas**

Pertanggungjawaban terhadap seluruh proses alokasi dan realisasi anggaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyimpangan serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

#### **5. Transparansi**

Seluruh proses perencanaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan ini bertujuan untuk menghindari praktik penyalahgunaan dan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana.

Kelima prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara tepat sasaran dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Pengelolaan dana BOS mencakup tiga tahapan utama yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Pengelolaan yang baik harus sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan publik dan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

## METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan sesuai dengan kondisi alamiah dan peneliti menjadi *human instrument*, orang yang mampu menganalisis situasi yang diteliti menjadi lebih dalam (Sugiyono, 2020) Pendekatan ini dilakukan dengan Teknik analisis mendalam untuk memahami fenomena sosial dengan pendekatan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menghasilkan pemahaman mendalam.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data Primer didapatkan dengan melakukan Observasi dan Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, dan Tenaga Kependidikan di SDN Waru 03. Sementara itu, data sekunder diperoleh peneliti untuk melengkapi informasi penelitian yang terdiri dari dokumen-dokumen pendukung dalam pengelolaan dana BOS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Dana bos pada SDN Waru 03

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Waru 03 dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan ini membentuk satu siklus pengelolaan keuangan sekolah yang sistematis dan saling berkaitan. Proses ini dilaksanakan mengacu pada petunjuk teknis BOS yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Ketepatan dalam pelaksanaan setiap tahap menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola keuangan sekolah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tahap perencanaan dimulai dengan pelaksanaan rapat internal yang melibatkan Tim BOS dan beberapa staf sekolah lainnya. Forum ini menjadi ruang diskusi dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang bersifat prioritas dan mendesak. Penyusunan rencana anggaran dilakukan berdasarkan hasil analisis dari rapor pendidikan sekolah yang mencerminkan kondisi nyata sekolah. Setelah kebutuhan dirumuskan, sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang kemudian diinput ke dalam sistem ARKAS. Proses ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa perencanaan dilakukan berdasarkan kondisi nyata sekolah, melibatkan partisipasi internal, dan sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOS tahun berjalan.

Pada tahap pelaksanaan, SDN Waru 03 menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui platform SiPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Seluruh transaksi dilakukan secara digital dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban seperti faktur, kwitansi, berita acara serah terima (BAST), dan dokumentasi barang. Penggunaan sistem ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana karena setiap transaksi akan tercatat secara otomatis dalam sistem. Selain itu, bukti-bukti yang disimpan menjadi dasar akuntabilitas dan mempermudah proses audit internal maupun eksternal.

Tahap evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim BOS dengan cara menyusun laporan realisasi anggaran dan capaian program yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Evaluasi ini disertai dengan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk membuktikan kesesuaian antara anggaran dan output yang dicapai. Kegiatan evaluasi juga dilakukan secara internal melalui rapat tinjauan pelaksanaan yang membahas hambatan serta rekomendasi perbaikan.

Ketiga tahapan ini menggambarkan praktik pengelolaan dana BOS yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SPIP, khususnya dalam aspek pengendalian aktivitas, penyampaian informasi yang tepat waktu, serta pemantauan berkelanjutan. Hal ini menjadi cerminan dari upaya sekolah dalam membangun sistem pengelolaan dana yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

### Kesesuaian PP no 60 tahun 2008 Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOS

Tabel 1. Indikator Lingkungan Pengendalian pada SPI pengelolaan dana BOS

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
1	Penguatan komitmen	Kepala sekolah dan bendahara	Sudah Efektif

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
	terhadap kejujuran dan nilai-nilai etika	menunjukkan komitmen menjaga pengelolaan dana BOS agar tetap sesuai dengan petunjuk teknis, sebagai bentuk integritas dan kepatuhan.	
2	Dedikasi dalam pengembangan keterampilan individu	Pelatihan teknis lebih banyak diikuti oleh kepala sekolah dan operator BOS, sementara bendahara terakhir mengikuti pelatihan pada tahun 2021.	Kurang efektif
3	Perancangan/penyusunan Struktur organisasi yang proporsional dan fungsional	Struktur tim BOS telah dibentuk secara fungsional dan melibatkan berbagai unsur sekolah, termasuk komite dan perwakilan siswa.	Sudah efektif
4	Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Pembagian tugas antar anggota tim berjalan dengan jelas, dan pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka dalam rapat sekolah.	Sudah Efektif
5	Optimalisasi fungsi pengawasan internal	Kepala sekolah turut terlibat dalam pengawasan internal dengan melakukan verifikasi terhadap transaksi yang diinput ke RKAS.	Sudah Efektif
6	Sinergi pihak eksternal yang relevan	Koordinasi dengan pihak eksternal masih terbatas pada evaluasi triwulan, dan intensitas pendampingan teknis dari pengawas cenderung menurun.	Kurang efektif

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah dan bendahara di SDN Waru 03 telah menunjukkan komitmen terhadap integritas dalam pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, dan struktur tim BOS telah disusun secara fungsional dengan melibatkan unsur sekolah serta komite. Pembagian tugas antar anggota tim juga berjalan dengan jelas, didukung oleh pelaporan yang disampaikan secara terbuka dalam rapat internal. Selain itu, kepala sekolah turut menjalankan fungsi pengawasan dengan memverifikasi setiap transaksi yang diinput dalam aplikasi RKAS, yang mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Namun demikian, beberapa kelemahan masih ditemukan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan teknis masih belum merata, di mana bendahara belum mengikuti pelatihan terbaru sejak tahun 2021, sementara pelatihan lebih difokuskan pada kepala sekolah dan operator BOS. Selain itu, koordinasi dengan pihak eksternal, seperti pengawas sekolah atau dinas, masih bersifat pasif dan terbatas pada kegiatan evaluasi triwulanan. Kurangnya pendampingan teknis secara intensif dari pihak luar menunjukkan bahwa dukungan eksternal belum optimal dalam mendorong penguatan pengawasan dan pengendalian internal di sekolah.

Tabel 2. Indikator Penilaian Risiko pada SPI pengelolaan dana BOS

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
1	Pengenalan potensi risiko	Kepala sekolah telah menyadari adanya potensi risiko dalam pengelolaan dana BOS, khususnya yang disebabkan oleh	Sudah Efektif

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
		keterbatasan anggaran dan perubahan regulasi.	
2	Penilaian tingkat risiko	Sekolah telah menyusun langkah antisipatif terhadap keterbatasan fasilitas.	Sudah Efektif

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah SDN Waru 03 telah menunjukkan kesadaran terhadap potensi risiko dalam pengelolaan dana BOS. Risiko utama yang diidentifikasi berkaitan dengan terbatasnya alokasi anggaran yang diterima serta dinamika perubahan regulasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan program sekolah. Kesadaran ini penting sebagai langkah awal dalam membangun sistem pengendalian internal yang responsif terhadap tantangan di lapangan. Identifikasi risiko juga menjadi bagian dari strategi sekolah dalam menjaga agar penggunaan dana tetap efisien dan tidak melampaui batas ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya upaya ini, dapat disimpulkan bahwa unsur pengenalan dan penilaian risiko dalam komponen SPIP telah diimplementasikan secara fungsional dan relevan. Praktik ini menjadi bagian penting dalam memastikan dana BOS digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah.

Tabel 3. Indikator Kegiatan Pengendalian pada SPI pengelolaan dana BOS

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
1	Prioritas pada aktivitas utama organisasi	Sekolah menyusun RKAS secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak melalui diskusi bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah.	Sudah efektif
2	Keterkaitan pengendalian dengan penilaian risiko	Penyusunan RKAS telah dilakukan sesuai dengan JUKNIS BOS tahun berjalan agar senantiasa meminimalisir risiko penyimpangan.	Sudah efektif
3	Penyesuaian pengendalian dengan karakteristik organisasi	Sekolah sudah melakukan pertimbangan kondisi aktual menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam RKAS.	Sudah Efektif
4	Penetapan kebijakan dan prosedur secara tertulis	Sekolah belum memiliki SOP tertulis terkait pengelolaan dana BOS.	Belum Efektif
5	Melakukan prosedur tertulis secara rutin	Seluruh Transaksi keuangan dicatat secara tertulis dan dilakukan secara real-time	Sudah efektif

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
6	Evaluasi rutin mengenai efektivitas kegiatan pengendalian	Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala melalui rapat internal antara kepala sekolah, bendahara, dan tenaga kependidikan, untuk memastikan penyerapan dana sesuai perencanaan.	Sudah Efektif

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana BOS di SDN Waru 03 berjalan cukup efektif. Penyusunan RKAS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur sekolah, serta disusun mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Sekolah juga menggunakan analisis SWOT untuk menyesuaikan program kerja dengan kondisi aktual, yang mencerminkan perencanaan berbasis kebutuhan dan risiko.

Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi keuangan dicatat secara tertulis dan real-time, serta dievaluasi secara rutin melalui rapat internal. Evaluasi ini berperan dalam memastikan penggunaan dana tetap sesuai rencana. Namun, sekolah belum memiliki SOP tertulis sebagai panduan resmi, sehingga diperlukan dokumen kebijakan yang jelas agar proses pengendalian lebih konsisten dan terstandar.

Tabel 4. Indikator Informasi dan Komunikasi pada SPI pengelolaan dana BOS

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
1	Fasilitas Komunikasi	Komunikasi antara kepala sekolah dan bendahara berjalan efektif, tercermin dari rapat rutin dan diskusi bersama terkait pengelolaan keuangan sekolah.	Sudah Efektif
2	Sistem informasi pengelolaan	Penginputan data ke sistem informasi telah dilakukan secara digital dan berjalan dengan baik, mendukung pencatatan yang tertib dan akuntabel.	Sudah efektif

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi internal dalam pengelolaan dana BOS di SDN Waru 03 berjalan dengan cukup efektif. Koordinasi antara kepala sekolah dan bendahara dilakukan secara rutin melalui rapat dan diskusi yang membahas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana. Komunikasi yang terbuka ini menciptakan kerja sama yang baik antar pihak terkait, sehingga membantu mencegah miskomunikasi atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS. Pola komunikasi yang terbangun menunjukkan bahwa aspek informasi dan komunikasi dalam SPIP telah diterapkan secara fungsional di lingkungan sekolah.

Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan keuangan telah dilakukan secara digital melalui sistem informasi yang telah tersedia di sekolah. Penggunaan sistem ini tidak hanya mempercepat proses input data, tetapi juga mendukung keteraturan dan akurasi dalam pencatatan transaksi keuangan. Data keuangan yang terdokumentasi secara real-time memungkinkan pihak sekolah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara lebih mudah serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian

dalam pelaporan. Dengan demikian, penerapan sistem informasi ini berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan.

Tabel 5. Indikator Pemantauan pada SPI pengelolaan dana BOS

No	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Penilaian
1	Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap SPI	Kepala sekolah melakukan pemantauan langsung saat pengadaan barang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana.	Sudah efektif
2	Evaluasi terpisah terhadap efektifitas kinerja SPI	Evaluasi rutin dilakukan untuk meninjau penyerapan dana dan menyesuaikan anggaran bila ada kebutuhan mendadak.	Sudah efektif
	Tindak Lanjut atas rekomendasi pengauditan	Tidak terdapat temuan audit atau koreksi dari dinas, yang mengindikasikan pengelolaan dana telah berjalan sesuai ketentuan.	Sudah efektif

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan dalam sistem pengendalian internal di SDN Waru 03 telah dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Kepala sekolah terlibat langsung dalam proses pengawasan, khususnya pada tahap pengadaan barang, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam RKAS. Keterlibatan ini mencerminkan adanya komitmen dalam menjaga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran.

Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana dilakukan secara rutin melalui forum internal sekolah. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap serapan anggaran serta penyesuaian program apabila terdapat kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi. Mekanisme evaluasi ini memungkinkan sekolah untuk tetap adaptif terhadap kondisi di lapangan tanpa keluar dari koridor peraturan. Tidak adanya temuan atau koreksi dari hasil audit yang dilakukan oleh dinas pendidikan memperkuat bukti bahwa pengelolaan dana BOS di SDN Waru 03 telah dilakukan secara tertib, sesuai regulasi, dan mencerminkan penerapan SPIP yang efektif, khususnya pada aspek pemantauan dan tindak lanjut.

### **Kendala yang Dihadapi SDN Waru 03 pada Sistem Pengendalian Internal dalam mengelola Dana BOS**

Setelah dilakukan analisis terhadap kesesuaian penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam pengelolaan dana BOS di SDN Waru 03, ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan. Diantaranya ialah belum meratanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan teknis cenderung hanya difokuskan kepada kepala sekolah dan operator BOS, sementara bendahara sekolah belum mendapatkan pelatihan lanjutan sejak tahun 2021. Ketimpangan ini dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi dan pelaporan dana BOS secara menyeluruh.

Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan dana BOS. Salah satu contohnya adalah belum tersedianya ruang perpustakaan sebagai sarana pendukung kegiatan literasi siswa. Di samping itu, sekolah juga menghadapi tantangan dalam

menyesuaikan diri dengan regulasi baru terkait pembatasan honorarium bagi guru non-ASN. Perubahan kebijakan ini berpotensi memengaruhi struktur pembiayaan kegiatan sekolah ke depan, sehingga memerlukan strategi adaptasi yang tepat agar tidak mengganggu keberlangsungan program prioritas.

Kendala lain adalah belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang menjadi pedoman formal dalam pengelolaan dana BOS. Ketiadaan SOP dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan, terutama jika terjadi pergantian personel. Selain itu, koordinasi dan pendampingan teknis dari pihak eksternal, seperti pengawas sekolah atau dinas pendidikan, dinilai belum optimal karena hanya terbatas pada evaluasi triwulan tanpa pembinaan yang berkelanjutan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SPI di SDN Waru 03 masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek dokumentasi, pembinaan teknis, dan dukungan kelembagaan agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pengelolaan dana BOS di SDN Waru 03 dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan melalui rapat internal berdasarkan rapor pendidikan, kemudian dituangkan dalam RKAS. Pelaksanaan dilakukan secara non-tunai melalui SiPLah dengan pencatatan real-time pada aplikasi RKAS, dengan mendukung prinsip SPIP dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi dilakukan setiap triwulan oleh pihak internal dan eksternal untuk menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan.
2. Penerapan SPIP dalam pengelolaan dana BOS di SDN Waru 03 menunjukkan kinerja yang cukup baik pada sebagian besar komponen. Pada aspek lingkungan pengendalian, prinsip-prinsip dasar seperti etika kerja, struktur organisasi, dan pengawasan internal telah dijalankan secara efektif, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pengembangan kompetensi individu dan koordinasi eksternal. Komponen penilaian risiko telah diterapkan dengan baik melalui identifikasi risiko dan upaya mitigasi oleh kepala sekolah. Kegiatan pengendalian juga berjalan efektif, namun belum didukung oleh SOP tertulis yang spesifik untuk pengelolaan dana BOS. Dari sisi informasi dan komunikasi, pencatatan digital melalui RKAS dan koordinasi internal telah mendukung transparansi. Sementara itu, pemantauan dilakukan secara rutin dan sistematis, dibuktikan dengan tidak ditemukannya pelanggaran dalam audit, yang mencerminkan keberlanjutan mekanisme pengawasan.
3. Penerapan SPIP di SDN Waru 03 masih menghadapi beberapa kendala strategis. Keterbatasan pengembangan kapasitas SDM, khususnya minimnya pelatihan teknis bagi bendahara, menunjukkan lemahnya aspek penguatan kompetensi dalam lingkungan pengendalian. Fasilitas yang belum optimal, seperti belum tersedianya ruang perpustakaan, mencerminkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program berbasis kebutuhan. Selain itu, penyesuaian terhadap regulasi terbaru, seperti perubahan kebijakan honorarium guru honorer, menjadi tantangan tersendiri. Ketiadaan SOP tertulis juga mengindikasikan lemahnya standardisasi prosedur, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan, terutama saat terjadi pergantian Anggota. Di sisi lain, koordinasi eksternal yang masih terbatas, khususnya minimnya pembinaan dari pengawas sekolah, menunjukkan bahwa sinergi lintas pihak masih perlu diperkuat.

Saran untuk SDN Waru 03 ialah Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui *sharing session* internal dan pelatihan teknis dari Dinas Pendidikan. Kedua, optimalisasi fasilitas dengan memanfaatkan pojok baca serta perencanaan pembangunan perpustakaan secara bertahap. Ketiga, penyesuaian anggaran sejak awal untuk mengantisipasi perubahan regulasi. Keempat, penyusunan SOP tertulis guna menjaga konsistensi pengelolaan dana BOS. Kelima, penguatan koordinasi eksternal melalui konsultasi rutin dan forum BOS sebagai sarana pembinaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Erwin Lumban Gaol. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri 16 Urat Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.
- Isnaini Hamidi, M., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2023). Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Pendidikan di Kota Mataram. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 120–126. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.186>
- Jaya, H. (2021). Analisis Pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Journal of the Accounting Study Program*, 15(2), h.43-49.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
- Qurrota A'yun Zain. (2024). Evaluasi Pengendalian Internal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Kaliboto LOR 12 Kecamatan Jatiroto Kabupaten Luamajang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Dalam P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 17). Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, F. S., Masnila, N., & Aryani, Y. A. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun 2017-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 2017–2021. <https://www.bpk.go.id/ihps>